

**KOMUNIKASI ORGANISASI VERTIKAL SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, BUDAYA ORGANISASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL  
(Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo)**

**Nur Fina Saputri**

Alumni Fakultas Ekonomi UST  
Email: [nurfinasaputri@gmail.com](mailto:nurfinasaputri@gmail.com)

***Abstract***

*This study aims to determine the effect of human resource quality, organizational culture and information technology on the application of accrual-based SAP with vertical organizational communication as a moderation variable. This research was conducted at BKAD Kulonprogo Regency. The respondents consist of 40 BKAD staff using simple random sampling method. The data used in the form of primary data by using questionnaires from some modified previous research, interviews, and observations. Moderation analysis with moderated regression analysis (MRA) test was used to analyze the data.*

*The results of this study indicate that the quality of human resources positively affect the application of accrual-based SAP, organizational culture has a positive effect on the accrual-based SAP applications, information technology has no effect on the accrual-based SAP implementation, vertical organizational communication strengthens the relationship between the quality of human resources with the accrual-based SAP implementation, vertical organization does not reinforce the relationship between with the accrual-based SAP implementation, and vertical organizational communication does not reinforce the relationship between information technology and the accrual-based SAP implementation.*

**Keywords:** *Accrual-Based SAP Application, Information Technology Organizational Culture, Vertical Organization Communication, Quality of Human Resources*

**PENDAHULUAN**

Organisasi sektor publik di seluruh dunia telah terlibat dalam strategi perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan, efisiensi dan efektifitas (Kusuma, 2013). Menurut Yafie (2013), dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, maka penting bagi penyelenggara laporan keuangan pemerintah dalam menggunakan basis akuntansi yang tepat untuk memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik. Hal ini karena merupakan bagian dari bentuk tanggungjawab kepada rakyat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan tepat mengenai basis akuntansi yang digunakan. Penegasan tentang hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan isu yang menarik untuk diteliti, dikarenakan adanya kewajiban bagi seluruh entitas untuk menerapkannya paling lambat tahun 2015, setelah mengalami penundaan dari tahun 2008 (Sari dkk, 2016). Permasalahan yang terjadi sampai sekarang di tahun 2017 adalah satuan pemerintah daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah, akan tetapi masih banyak kendala yang dirasakan oleh para satuan kerja pemerintahan, padahal Standar

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini sudah diterapkan penuh sejak tahun 2015 yang lalu. Hal tersebut dikarenakan adanya kelebihan dan kekurangan terhadap faktor-faktor yang mendukung penerapan SAP berbasis akrual tersebut.

Fenomena yang terjadi di BKAD Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2017, masih adanya sumber daya manusia yang tidak kompeten. Hal tersebut terlihat dari tingkat pendidikan pegawai yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai BKAD Kabupaten Kulonprogo**

<i>No</i>	<i>Pendidikan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Prosentase</i>	<i>Kesesuaian pendidikan dengan pekerjaan</i>	<i>Prosentase</i>
1.	SMA	29	34%	11	13%
2.	KPAA	1	1%	1	1%
3.	D1	1	1%	1	1%
4.	D3	12	14%	11	13%
5.	S1	36	42%	35	41%
6.	S2	7	8%	7	8%
	<b>Total</b>	86	100%	66	77%

Sumber: *Bezetter* PNS Kabupaten Kulonprogo

Pada tabel 1.1 prosentase tingkat pendidikan tertinggi adalah pada jenjang S1 yaitu pada angka 42%, maka dapat dikatakan bahwa sudah ada keseimbangan tingkat pendidikan di BKAD Kabupaten Kulonprogo. Namun dari 86 pegawai, masih terdapat sebanyak 23% atau 20 pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan pekerjaannya. Dalam wawancara dengan penulis, Artiningsih (10 November 2017) mengatakan bahwa masalah mengenai ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan dapat diatasi dengan adanya kemauan keras pegawai untuk belajar dan berkeinginan untuk bisa. Pemerintah dalam hal ini BKAD Kabupaten Kulonprogo menerapkan budaya kerja yang sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menekankan pada tata krama antar pegawai dan pelayanan pada masyarakat, selain itu juga menerapkan sistem *punishment* kepada pegawai yang tidak disiplin. Budaya tersebut dapat meningkatkan kinerja dan integritas SKPD. Dari sisi komunikasi organisasi, komunikasi timbal balik lebih sering dilakukan pada saat penyelesaian target pekerjaan, beberapa pegawai terkadang terlambat/lamban melaporkan tugas-tugasnya, sehingga pemimpin harus berperan mengingatkan dan membimbing pegawai tersebut. Teknologi informasi seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sudah digunakan dengan baik, namun jika dilihat dari segi kualitasnya, masih ada beberapa sarana prasarana teknologi informasi yang spesifikasinya kurang memadai (Tjindewati, wawancara, 14 November 2017). Hal ini akan berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Terkait dengan permasalahan dalam penerapan SAP berbasis akrual dan hasil penelitian yang masih inkonsistensi, maka peneliti mengambil judul “Komunikasi Organisasi Vertikal sebagai Pemoderasi Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi, dan Teknologi Informasi pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual” (Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo).

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Kualitas SDM Pada Penerapan SAP Berbasis Akrual**

Menurut Hasibuan (2003:3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Menurut Raharjo (1993), kualitas sumber daya manusia itu tidak hanya ditentukan

oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya.

Jika dilihat dari sebuah instansi pemerintahan, pegawai SKPD merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan penting di dalam pencapaian tujuan organisasi. Aparatur pemerintahan seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup khususnya terkait dengan PP No. 71 yaitu tentang SAP berbasis akrual, sehingga implementasi aturan tersebut dapat berjalan sebagaimana seharusnya (Azwan, 2015). Semakin baik pengetahuan yang dimiliki aparatur pemerintahan, maka SDM yang ada di dalam SKPD tersebut dapat dikatakan berkualitas. SDM yang berkualitas lebih menguasai dan memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu yang berkaitan dengan SAP berbasis akrual. Dengan adanya SDM yang berkualitas, sangat memungkinkan jika penerapan SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Iznillah (2015:12) dan Sukadana dan Mimba (2015:46) yang menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berbeda dengan penelitian Sari, dkk (2016) menyimpulkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

**H1:** Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif pada penerapan SAP berbasis akrual.

### **Pengaruh Budaya Organisasi Pada Penerapan SAP Berbasis Akrual**

Azwan (2015), mendefinisikan budaya organisasi sebagai sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Di dalam penelitiannya juga ditemukan bahwa di dalam lingkungan kerja sektor pemerintahan, sangat diperlukan budaya organisasi yang selalu memperlihatkan mereka sebagai bagian dari aparatur negara yang memiliki atau kemauan bekerja keras, atau disiplin di dalam melakukan pekerjaan.

Penerapan SAP berbasis akrual merupakan perubahan SAP yang belum lama diterapkan secara penuh. Menghadapi tantangan perubahan tersebut, budaya organisasi berperan sebagai sumber kekuatan penting yang diyakini dan dianut secara luas yang mana bisa membentuk karyawan mudah beradaptasi dengan praktik-praktik baru yang ada di dalam SAP berbasis akrual. Semakin baik budaya organisasi yang dianut, sangat memungkinkan jika penerapan SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Witantri (2012) dan Sugiarto dan Alfian (2014) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Munandar (2016) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh kesiapan pemerintah dalam penerapan SAP berbasis akrual.

**H2:** Budaya organisasi berpengaruh positif pada penerapan SAP berbasis akrual.

### **Pengaruh Teknologi Informasi Pada Penerapan SAP Berbasis Akrual**

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (William dan Sawyer dalam Haryanto, 2012). Dalam organisasi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pengolahan data.

Menurut Sugandi (2012), agar dapat terlaksananya pengelolaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi yang memadai. Penerapan SAP berbasis akrual merupakan penerapan akuntansi yang sangat kompleks, sehingga diperlukan sistem akuntansi dan teknologi informasi berbasis *system* di lingkungan pemerintah (Simanjuntak, 2010). *System* yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah akan memudahkan aparatur pemerintahan untuk menghasilkan informasi keuangan yang lebih tepat dan akurat. Semakin baik teknologi informasi yang digunakan, maka sangat memungkinkan jika penerapan SAP berbasis akrual berjalan dengan baik.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningrum (2017) dan Santoso (2015) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Berbeda dengan penelitian Iznillah (2015) yang menjelaskan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

**H3:** Teknologi informasi berpengaruh positif pada penerapan SAP berbasis akrual.

### **Komunikasi Organisasi Vertikal sebagai Pemoderasi Pengaruh Kualitas SDM Pada Penerapan SAP Berbasis Akrual**

Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan Negara. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung tidak peduli terhadap perubahan. Kualitas sumber daya manusia diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia tersebut, semakin kuat tanggung jawab dan daya saing dalam melaksanakan tugasnya, Aldiani (2010) dalam Putra dan Ariyanto (2015).

Perusahaan atau organisasi perlu menyadari pentingnya memperhatikan aspek sumber daya manusia sebagai asset utama dalam memajukan organisasi atau perusahaan. Salah satu cara adalah dengan melakukan komunikasi yang transparan dan dapat diterima oleh kalangan pegawainya (Jannah, 2010). Dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif diantara pegawai dengan atasannya ataupun sebaliknya, sangat memungkinkan para pegawai akan lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas kewajibannya dan meningkatkan kualitas dirinya untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Hal ini tentunya akan sangat mendukung berhasilnya penerapan SAP berbasis akrual.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Rahmayati (2012) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia menjadi kunci utama pelaksanaan kegiatan dan menentukan tercapai tidaknya tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ariyanto (2015:29) yaitu bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

**H4:** Komunikasi organisasi vertikal memperkuat pengaruh kualitas SDM pada penerapan SAP berbasis akrual.

### **Komunikasi Organisasi Vertikal sebagai Pemoderasi Pengaruh Budaya Organisasi Pada Penerapan SAP Berbasis Akrual**

Menurut Schein (1992:12), budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Budaya organisasi menentukan sikap seseorang untuk menerima atau menolak adanya perubahan serta mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaannya.

Sebuah organisasi yang sehat, yang memahami pentingnya komunikasi timbal balik ini tidak akan pernah mengabaikan berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi manajemen ini. Seorang pimpinan yang memahami betul peran pegawai dalam kemajuan organisasi akan

sangat menghargai berbagai masukan dan kritikan yang disampaikan oleh pegawainya (Jannah, 2010). Dengan adanya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan maupun bawahan dengan atasan, sangat memungkinkan terciptanya budaya organisasi yang baik pula. Hal ini akan mendorong berhasilnya penerapan SAP berbasis akrual.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Sugiarto dan Alfian (2014) menunjukkan bahwa budaya organisasi secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Untuk membentuk budaya organisasi tersebut maka diperkuat dengan adanya komunikasi, pada penelitian Safitri (2017:186) menyimpulkan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

**H5:** Komunikasi organisasi vertikal memperkuat pengaruh budaya organisasi pada penerapan SAP berbasis akrual.

### **Komunikasi Organisasi Vertikal sebagai Pemoderasi Pengaruh Teknologi Informasi Pada Penerapan SAP Berbasis Akrual**

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (William dan Sawyer dalam Haryanto, 2012). Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu sistem akuntansi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar (Iznillah, 2015).

Dalam setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi (Putra dan Ariyanto, 2015). Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan sosialisasi termasuk dari aliran komunikasi organisasi vertikal (kebawah dan keatas). Perlu adanya komunikasi yang terarah untuk meningkatkan teknologi informasi yaitu dengan sosialisasi, sehingga teknologi informasi andal untuk penerapan SAP berbasis akrual.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningrum (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Perlu adanya instruksi dalam penggunaan teknologi informasi, sehingga diperkuat dengan komunikasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ariyanto (2015) menemukan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

**H6:** Komunikasi organisasi vertikal memperkuat pengaruh teknologi informasi pada penerapan SAP berbasis akrual.

### **Pengaruh Kualitas SDM, Budaya Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi Organisasi Vertikal pada Penerapan SAP Berbasis Akrual**

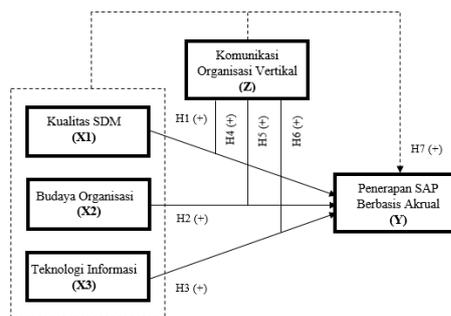
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan penting di dalam pencapaian tujuan organisasi. SDM yang berkualitas lebih menguasai dan memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya. Dengan adanya SDM yang berkualitas, sangat memungkinkan jika penerapan SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan baik. Menghadapi tantangan perubahan SAP berbasis akrual tersebut, budaya organisasi berperan sebagai sumber kekuatan penting yang diyakini dan dianut secara luas yang mana bisa membentuk

karyawan mudah beradaptasi dengan praktik-praktik baru yang ada di dalam SAP berbasis akrual. Semakin baik budaya organisasi yang dianut, sangat memungkinkan jika penerapan SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan baik. Penerapan SAP berbasis akrual merupakan penerapan akuntansi yang sangat kompleks, sehingga diperlukan sistem akuntansi dan teknologi informasi berbasis *system* di lingkungan pemerintah (Simanjuntak, 2010). Semakin baik teknologi informasi yang digunakan, maka sangat memungkinkan jika penerapan SAP berbasis akrual berjalan dengan baik. Sebuah organisasi yang sehat, yang memahami pentingnya komunikasi vertikal (atasan bawahan) tidak akan pernah mengabaikan berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi manajemen. Dengan adanya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan maupun bawahan dengan atasan, sangat memungkinkan jika penerapan SAP berbasis akrual berjalan dengan baik.

Dalam penelitian Adventana dan Kurniawan (2013) dan penelitian Pratiwi dkk. (2017) menemukan bahwa SDM, teknologi informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Sejalan dengan penelitian

**H7:** Kualitas SDM, Budaya Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi Organisasi Vertikal berpengaruh secara simultan pada penerapan SAP berbasis akrual.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**



**METODE PENELITIAN**

**Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survey, yang mana data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner di lapangan.

**Pengembangan Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengukur variabel independen, moderating dan dependen menggunakan kuesioner. Sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya maka terlebih dahulu dilakukan *pilot test*. *Pilot test* pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden kepada sebagian staf akuntansi dan aset BPKD Klaten.

Pada penelitian ini, variabel ini akan diukur dengan *skala likert* 5 point mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Berikut ringkasan definisi penerapan SAP berbasis akrual:

a. **Penerapan SAP Berbasis Akrual**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

No	Indikator	Skala
1.	Kesiapan SDM	Ordinal
2.	Peran SAP berbasis akrual	
3.	Faktor pendukung SAP	

No	Indikator	Skala
	berbasis akrual	

Sumber: Putri (2016) dimodifikasi.

**b. Kualitas SDM**

Manusia sebagai sumber daya adalah makhluk yang unik dan kompleks, yang bekerja di lingkungan sebuah perusahaan harus diperlakukan dengan Kualitas Kehidupan Kerja (QWL) yang baik agar memungkinkannya bekerja secara efektif, efisien, produktif, dan berkualitas. (Nawawi, 2001:38).

No	Indikator	Skala
1.	Kemampuan individu (Nihayah, 2015)	Ordinal
2.	Peran dan fungsi untuk mencapai tujuan (Arfianti, 2011)	
3.	Pelatihan yang teratur (Arfianti, 2011)	
4.	Memahami prosedur dan proses akuntansi (Arfianti, 2011)	

Sumber: Andriyani (2017) dimodifikasi.

**c. Budaya Organisasi**

Menurut Wirawan (2008:10) budaya organisasi didefinisikan sebagai norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan sebagainya (isi budaya organisasi) yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi.

No	Indikator	Skala
1.	Inovasi dan pengambilan resiko (Robbins, 2006)	Ordinal
2.	Perhatian terhadap detail (Robbins, 2006)	
3.	Orientasi hasil (Robbins, 2006)	
4.	Orientasi individu (Robbins, 2006)	
5.	Orientasi tim (Robbins, 2006)	

Sumber: Maulina (2017) dimodifikasi.

**d. Teknologi Informasi**

Menurut William dan Sawyer (2003) dalam Sutabri (2014), teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.

No	Indikator	Skala
1.	Penyediaan komputer dan jejaring internet	Ordinal
2.	Pengelolaan dan penyimpanan data keuangan (Nihayah, 2015)	
3.	Pengolahan informasi dengan jaringan internet (Haza, 2014)	
4.	Sistem manajemen (Nihayah, 2015)	
5.	Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer (Haza, 2014)	

Sumber: Riana (2017) dimodifikasi.

**e. Komunikasi Organisasi Vertikal**

Komunikasi vertikal adalah arus komunikasi dua arah timbal balik yang dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen memegang peranan yang sangat vital. Komunikasi vertikal merupakan proses komunikasi yang dilakukan dari atasan ke bawahan dan sebaliknya. Komunikasi ke atas menurut Wursanto (2001:54), komunikasi keatas adalah komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan.

No	Indikator	Skala
1.	Kualitas media informasi	Ordinal
2.	Aksesibilitas informasi	
3.	Penyebaran informasi	
4.	Beban informasi	
5.	Ketepatan informasi	

Sumber: Pace dan Faules (2002) diolah.

**Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan**

Populasi dalam penelitian ini adalah BKAD Kabupaten Kulonprogo. Sampel yang digunakan adalah sebagian staf BKAD Kabupaten Kulonprogo sebanyak 40 responden. Pada penelitian ini dilakukan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Kualitas Data**

**Uji Validitas Data dan Reliabilitas Data**

Berdasarkan hasil uji validitas dibuktikan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Sedangkan uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai Cronbach Alpha yang lebih tinggi dari 0,600.

**Uji Asumsi Klasik**

Pada penelitian ini berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

**Hasil Pengujian Hipotesis**

**Pengaruh Kualitas SDM pada Penerapan SAP Berbasis Akruar**

Tabel 4.1  
 Hasil Uji Parsial (uji t) Hipotesis 1  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.876	4.216		6.138	.000
Kualitas SDM	.439	.123	.502	3.578	.001

a. Dependent Variable: Penerapan SAP berbasis akruar

Sumber: Data primer diolah 2017

Koefisien regresi pada variabel independen yaitu kualitas SDM sebesar 0,439 dan berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akruar. Pembuktian selanjutnya adalah dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel, maka  $H_1$  terdukung dan  $H_0$  ditolak. Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah 3,578 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 1,68957.

Kesimpulannya yaitu kualitas SDM berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akruar. Aparatur pemerintahan seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup

khususnya terkait dengan PP No. 71 yaitu tentang SAP berbasis akual, sehingga implementasi aturan tersebut dapat berjalan sebagaimana seharusnya (Azwan, 2015). Semakin baik pengetahuan yang dimiliki aparatur pemerintahan, maka SDM yang ada di dalam SKPD tersebut dapat dikatakan berkualitas. SDM yang berkualitas lebih menguasai dan mampu untuk menerapkan ilmu yang berkaitan dengan SAP berbasis akual, maka penerapan SAP berbasis akual juga dapat berjalan dengan baik.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Parsial (uji t) Hipotesis 2**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

<i>Model</i>	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	23.232	5.560		4.178	.000
Budaya Organisasi	.453	.142	.459	3.184	.003

a. Dependent Variable: Penerapan SAP berbasis akual  
 Sumber: Data primer diolah, 2107

Koefisien regresi pada variabel independen yaitu budaya organisasi adalah 0,453 dan berpengaruh positif pada penerapan SAP berbasis akual. Pembuktian selanjutnya adalah dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel, maka  $H_2$  terdukung dan  $H_0$  ditolak. Tabel di atas menunjukkan nilai t hitung adalah sebesar 3,184 yang lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,68957.

Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akual. Penerapan SAP berbasis akual merupakan perubahan SAP yang belum lama diterapkan secara penuh, budaya organisasi berperan sebagai sumber kekuatan penting yang diyakini dan dianut secara luas yang mana bisa membentuk karyawan mudah beradaptasi dengan praktik-praktik baru yang ada di dalam SAP berbasis akual. Semakin baik budaya organisasi yang dianut, maka penerapan SAP berbasis akual juga dapat berjalan dengan baik.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Parsial (uji t) Hipotesis 3**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

<i>Model</i>	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	32.238	5.455		5.910	.000
Teknologi Informasi	.230	.144	.250	1.590	.120

a. Dependent Variable: Penerapan SAP Berbasis Akual  
 Sumber: Data primer diolah, 2017

Koefisien regresi pada variabel independen yaitu teknologi informasi adalah 0,230 dan tidak berpengaruh pada penerapan SAP berbasis akual. Pembuktian selanjutnya adalah dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel, maka  $H_3$  terdukung dan  $H_0$  ditolak. Tabel di atas menunjukkan nilai t hitung adalah sebesar 1,590 yang lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 1,68957.

Kesimpulannya yaitu teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akual. Alasan yang dapat dijelaskan atas tidak berhasilnya penelitian ini menerima hipotesis tersebut yaitu, dengan penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akual mungkin disebabkan karena terbatasnya sarana prasana teknologi informasi yang berkualitas. Dalam penelitian Alfian (2015) juga menyebutkan

bahwa banyak pegawai SKPD Kabupaten Kulonprogo yang lebih memilih tidak menggunakan *software* penunjang penerapan SAP berbasis akrual (seperti: SIMDA) untuk menyusun laporan keuangan pada pos-pos tertentu, melainkan memilih menggunakan *Microsoft Office Excel* atau alat bantu lainnya, sehingga penggunaan *software* penunjang penerapan SAP berbasis akrual kurang maksimal.

Tabel 4.4  
Uji MRA Hipotesis 4

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	164.628	49.874		3.301	.002
X1	-3.755	1.424	-4.299	-2.637	.012
Z	-4.013	1.449	-3.350	-2.770	.009
x1z	.121	.041	6.403	2.935	.006

a. Dependent Variable: Penerapan SAP berbasis akrual  
Sumber: Data primer diolah, 2017

Hasil tampilan SPSS 16.0 pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa secara individual variabel kualitas SDM (X1) memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari *alpha*, komunikasi organisasi vertikal memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari *alpha*, dan perkalian antara X1 dan Z menunjukkan signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari *alpha*. Variabel komunikasi organisasi sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh kualitas SDM terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien 0,121 dan signifikan 0,006 yang lebih rendah dari 0,050, maka variabel komunikasi organisasi vertikal merupakan variabel *quasi moderating*. Berdasarkan hal tersebut, maka H4 terdukung.

Komunikasi organisasi vertikal memperkuat hubungan antara kualitas SDM dengan penerapan SAP berbasis akrual. Perusahaan atau organisasi perlu menyadari pentingnya memperhatikan aspek sumber daya manusia sebagai aset utama dalam memajukan organisasi atau perusahaan, salah satu caranya adalah dengan melakukan komunikasi yang transparan dan dapat diterima oleh kalangan pegawainya. Dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif diantara pegawai dengan atasannya ataupun sebaliknya, maka para pegawai akan lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas kewajibannya dan meningkatkan kualitas dirinya untuk berubah menjadi lebih baik lagi.

Tabel 4.5  
Uji MRA Hipotesis 5  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	50.104	56.894		.881	.384
X2	-.418	1.468	-.423	-.285	.778
Z	-.726	1.622	-.606	-.447	.657
x2z	.024	.042	1.268	.571	.571

a. Dependent Variable: Y  
Sumber: Data primer diolah, 2017

Hasil tampilan SPSS 16.0 pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa secara individual variabel budaya organisasi (X2) memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,778 yang lebih besar dari *alpha*, komunikasi organisasi vertikal memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,657 yang lebih besar dari *alpha*, dan perkalian antara X2 dan Z menunjukkan signifikansi sebesar 0,571 yang lebih besar dari *alpha*. Variabel komunikasi organisasi vertikal tidak

memperlemah/memperkuat pengaruh budaya organisasi terhadap penerapan SAP berbasis aktual. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien 0,024 dan signifikan 0,571 yang lebih tinggi dari 0,050, maka variabel komunikasi organisasi vertikal bukan merupakan variabel moderasi. Berdasarkan hal tersebut, maka H5 tidak terdukung.

Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu komunikasi organisasi vertikal tidak memoderasi hubungan antara budaya organisasi dengan penerapan SAP berbasis aktual. Alasan atau argumentasi yang dapat dijelaskan atas tidak berhasilnya penelitian ini menerima hipotesis tersebut, mungkin disebabkan karena BKAD Kabupaten Kulonprogo sudah memiliki standar budaya kerja.

Tabel 4.6  
Uji MRA Hipotesis 6  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	104.151	47.913		2.174	.036
	X3	-1.907	1.253	-2.073	-1.522	.137
	Z	-2.047	1.383	-1.709	-1.480	.148
	x3z	.061	.036	3.241	1.688	.100

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah, 2017

Hasil tampilan SPSS 16.0 pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa secara individual variabel teknologi informasi (X3) memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,137 yang lebih besar dari *alpha*, komunikasi organisasi vertikal memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,148 yang lebih besar dari *alpha*, dan perkalian antara X3 dan Z menunjukkan signifikansi sebesar 0,100 yang lebih besar dari *alpha*. Variabel komunikasi organisasi vertikal tidak memperlemah/memperkuat pengaruh teknologi informasi terhadap penerapan SAP berbasis aktual. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien 0,061 dan signifikan 0,100 yang lebih tinggi dari 0,050, maka variabel komunikasi organisasi vertikal bukan merupakan variabel moderasi. Berdasarkan hal tersebut, maka H6 tidak terdukung.

Kesimpulannya yaitu komunikasi organisasi vertikal tidak memoderasi hubungan antara teknologi informasi dengan penerapan SAP berbasis aktual. Alasan atau argumentasi yang dapat dijelaskan atas tidak berhasilnya penelitian ini menerima hipotesis tersebut yaitu, mungkin disebabkan karena BKAD Kabupaten Kulonprogo sudah melakukan pelatihan/diklat untuk meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tanpa harus menggunakan komunikasi organisasi vertikal (arus komunikasi timbal balik) untuk mengkomunikasikan peningkatan penggunaan *software* penunjang SAP berbasis aktual yang menghasilkan teknologi informasi yang andal sehingga mempengaruhi penerapan SAP berbasis aktual.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Simultan Hipotesis 7**

ANOVA <sup>b</sup>						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	156.281	4	39.070	5.340	.002 <sup>a</sup>
	<i>Residual</i>	256.094	35	7.317		
	<i>Total</i>	412.375	39			

a. Predictors: (Constant), SUM.Z, SUM.X1, SUM.X3, SUM.X2

b. Dependent Variable: SUM.Y

Sumber: Data primer diolah, 2017

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai F hitung hasil *output* dari program SPSS 16.0 sebesar 5,340. Menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 5,340 lebih besar dari 2,64 dengan nilai signifikan sebesar 0,002. Maka variabel Kualitas SDM, Budaya Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi Organisasi Vertikal dinyatakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Penerapan SAP Berbasis Akruar. Yang artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Kesimpulannya yaitu kualitas SDM, budaya organisasi, teknologi informasi dan komunikasi organisasi vertikal secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada penerapan SAP berbasis akruar. Penerapan SAP berbasis akruar merupakan penerapan akuntansi yang sangat kompleks, sehingga diperlukan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan standar ini. Dengan adanya SDM yang berkualitas, sangat memungkinkan jika penerapan SAP berbasis akruar dapat berjalan dengan baik. Penerapan SAP berbasis akruar merupakan perubahan SAP yang belum lama diterapkan secara penuh. Menghadapi tantangan perubahan tersebut, budaya organisasi berperan sebagai sumber kekuatan penting yang diyakini dan dianut secara luas yang mana bisa membentuk karyawan mudah beradaptasi dengan praktik-praktik baru yang ada di dalam SAP berbasis akruar. Semakin baik budaya organisasi yang dianut, sangat memungkinkan jika penerapan SAP berbasis akruar dapat berjalan dengan baik. *System* yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah akan memudahkan aparaturnya untuk menghasilkan informasi keuangan yang lebih tepat dan akurat. Semakin baik teknologi informasi yang digunakan, maka sangat memungkinkan jika penerapan SAP berbasis akruar berjalan dengan baik. Dengan adanya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan maupun bawahan dengan atasan, sangat memungkinkan jika penerapan SAP berbasis akruar berjalan dengan baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- Kualitas SDM dan Budaya Organisasi berpengaruh positif pada penerapan SAP berbasis akruar.
- Teknologi Informasi tidak berpengaruh pada penerapan SAP berbasis akruar.
- Komunikasi Organisasi Vertikal memperkuat hubungan antara kualitas SDM dengan penerapan SAP berbasis akruar.
- Komunikasi Organisasi Vertikal tidak memoderasi hubungan antara budaya organisasi dan teknologi informasi pada penerapan SAP berbasis akruar.

### **Saran**

BKAD Kabupaten Kulonprogo hendaknya menyamaratakan spesifikasi sarana prasarana teknologi informasi yang ada agar penggunaan *software* terintegrasi pengelolaan keuangan penunjang penerapan SAP berbasis akruar seperti SIMDA dapat digunakan dengan maksimal, sehingga akan menghasilkan informasi yang andal dan pegawai tidak lagi

menggunakan alternatif lain untuk menghindari *software* tersebut serta meningkatkan komunikasi antara atasan dengan pegawainya. Selain itu komunikasi timbal balik yang terarah dan terstruktur akan meningkatkan penggunaan *software* penunjang SAP berbasis akrual untuk penyusunan laporan keuangan, karena terkomunikasinya penggunaan teknologi informasi dengan baik.

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dan memperbesar jumlah sampel. Penelitian ini belum mengungkapkan keseluruhan variabel yang diperkirakan turut serta mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adventana, Gabriella Ara dan Ch.Heni Kurniawan. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010*. Ringkasan Penelitian. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Alfian, Mohammad. 2015. *Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Kulonprogo*. Jurnal. Semarang: Universitas Sebelas Maret.
- Azwan, Mohammad Man. 2015. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: Sebuah Analisis Deskriptif*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo. Daftar Normatif/ Bezetter Pegawai Negeri Sipil bulan Agustus 2017.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Iznillah, M Luthfi. 2015. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Jannah, Royhatul. 2016. *Fungsi Komunikasi Vertikal dalam Meningkatkan Produktifitas Kerja Pegawai Di PT. Telkom, Tbk. Kandatel Bandung*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan Bandung.
- Kusuma, Muhamad Indra Yudha. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Laksono, Luthfi Masir Puji. 2016. *Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Profesionalisme Aparat Terhadap Kesiapan Penerapan PP 71. Revisi 2011 (Studi Empiris Penerapan PP 71 Kota Malang Provinsi Jawa Timur)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Maulina, Dirahayu. 2017. *Pengaruh Penyusunan Anggaran Partisipatif, Motivasi Kerja, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimoderasi Oleh Budaya Organisasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Nawawi, H. Hadari. 2001. *Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pace, R. Wayne dan Don F.Faules. 2002. *Komunikasi Organisasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Pratiwi, Annisa Intan, Sri Rahayu dan Djusnimar Zutilisna. 2017. *Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Komunikasi terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Bandung (Studi Kasus: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Periode 2015)*. E-Proceeding of Management. Bandung: Telkom University.
- Purwaningrum, Idha. 2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Naskah Publikasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Putra, I Wayan Gede Yogiswara Darma dan Dodik Ariyanto. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAP Berbasis Akrual*. E-Jurnal Akuntansi. Denpasar: Universitas Udayana.
- Putri, Audi Norma Sari. 2016. *Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Kuesioner penelitian. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Raharjo, M. Dawam. 1993. *Intelektual, Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan.
- Rahmayati, Fitri. 2012. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementrerian Negara/Lembaga (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II)*. Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya.
- Safitri, Devi. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Bengkalis)*. Jurnal Akuntansi. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Santoso, singgih. 2015. *Menguasai SPSS 22 From Basic To Expert Skills*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sari, Fenty Herlina, dkk. 2016. *Motivasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi dan Teknologi Informasi Pada Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Denpasar: Universitas Udayana.
- Schein, Edgar H. 1992. *"Organizational Culture and Leadership"*. San Francisco: Jossey Bass.
- Simanjuntak, Binsar H. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Sektor Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Kongres Xi Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Sugandi, Joe. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada SKPD se-Kabupaten Kuansing)*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Sugiarto, Evans Sembada dan Mohammad Alfian. 2014. *Faktor-faktor Pendukung atas Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan di Kota Solo*. Economics dan Business Research Festival. Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Sukadana, Ikrima Chikita & Ni Putu Sri Harta Mimba. 2015. *Pengaruh Kualitas SDM terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Denpasar*. E-jurnal Akuntansi. Bali: Universitas Udayana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Wilkinson, Josep W. Et al. 2000. *Accounting Information System Essential Concept and Application*. 4 Edition. New York-USA: John Willey & Sons Inc.
- Williams dan Sawyer. 2003. *Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers and Communications*. London: Career Education.
- Wirawan. 2008. *Budaya dan Iklim Organisasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Wursanto, IG. 2001. *Manajemen Kepegawaian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yafie, M Dhairolly. 2013. *Penerapan Basis Akrual Pada Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Jurnal. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

